

Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Analisis Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penegakan

M. Ridha, Sudarmin

Sekolah Staf Dan Komando TNI, Indonesia

Email: ridhasitaba@gmail.com, darmin_wp97@yahoo.com

Abstrak

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang menimbulkan tantangan serius terhadap implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan HHI dalam konflik tersebut, dengan fokus pada konsekuensi hukum dari tindakan militer dan tantangan penegakan norma hukum internasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui analisis dokumen dari organisasi internasional (PBB, ICRC), resolusi Dewan Keamanan, serta wawancara dengan pakar hukum dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Israel maupun Palestina terindikasi melakukan pelanggaran prinsip-prinsip HHI, khususnya prinsip proporsionalitas dan pembedaan, yang berdampak besar pada warga sipil dan infrastruktur sipil. Mekanisme penegakan akuntabilitas, seperti Mahkamah Pidana Internasional, terbukti lemah karena hambatan yuridis dan politis. Interpretasi yang beragam terhadap prinsip HHI, serta kompleksitas konflik asimetris, turut memperparah ketidakefektifan norma hukum tersebut di lapangan. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan lebih inovatif dalam penegakan hukum humaniter, termasuk penguatan mekanisme pelaporan independen, pelatihan militer berbasis HHI, serta integrasi resolusi yang lebih adaptif. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi aktif antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil dan mendorong kepatuhan terhadap hukum humaniter dalam konflik yang sangat politis dan berkepanjangan ini.

Kata kunci: Konflik Israel-Palestina; Hukum Humaniter Internasional (HHI); Akuntabilitas; Perlindungan Sipil; Resolusi Internasional.

Abstract

The Israel–Palestine conflict is one of the longest-standing and most complex conflicts in modern history, presenting major challenges to the implementation of International Humanitarian Law (IHL). This study aims to analyze the dynamics of IHL application in this conflict, focusing on the legal consequences of military actions and the obstacles to enforcing international legal norms. Employing a qualitative case study approach, data were collected through document analysis of reports by international organizations (UN, ICRC), UN Security Council resolutions, and interviews with legal and human rights experts. The findings indicate that both Israel and Palestine have been implicated in potential violations of key IHL principles—particularly proportionality and distinction—which have resulted in significant harm to civilians and civilian infrastructure. Accountability mechanisms, such as the International Criminal Court, have proven ineffective due to political and jurisdictional limitations. Diverging interpretations of IHL principles and the complexities of asymmetric warfare further hinder the law’s effectiveness on the ground. These findings underscore the urgent need for more innovative approaches to IHL enforcement, including stronger independent monitoring mechanisms, IHL-based military training, and more adaptive international resolutions. The study recommends active collaboration between states, international organizations, and civil society to enhance civilian protection and promote compliance with humanitarian law in this highly politicized and protracted conflict.

Keywords: Israel-Palestine Conflict; International Humanitarian Law; Accountability; Civilian Protection; International Resolutions.



PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terlama dan paling kompleks di dunia modern, ditandai dengan kekerasan yang berulang dan pelanggaran hak asasi manusia serta hukum humaniter internasional (HHI) yang terus berlanjut (Rudi Candra et al., 2022). Akar konflik yang mendalam, terkait dengan klaim teritorial, identitas nasional, dan hak atas penentuan nasib sendiri, telah menciptakan siklus permusuhan yang sulit dipecahkan. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki peran krusial dalam mengatur perilaku pihak-pihak yang bertikai, bertujuan untuk meminimalisir penderitaan manusia dan melindungi warga sipil serta objek sipil selama berlangsungnya operasi militer. Namun, implementasi HHI di lapangan seringkali dihadapkan pada tantangan signifikan, termasuk interpretasi norma yang berbeda, tuduhan pelanggaran oleh kedua belah pihak, dan kesulitan dalam menegakkan akuntabilitas.

Dinamika konflik Israel-Palestina yang kompleks menuntut kajian mendalam terhadap aplikasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konteks peperangan modern, di mana penggunaan teknologi baru dan keterlibatan aktor non-negara semakin memperumit upaya perlindungan sipil (Cullinan, 2021; Galperin, 2018). Analisis terbaru menyoroti tantangan yang dihadapi HHI dalam menghadapi taktik militer kontemporer dan dampak inovasi teknologi terhadap prinsip-prinsip perang (Kammel, 2020; Shoukri, 2022). Lebih lanjut, penelitian juga mengeksplorasi peran komunitas internasional dalam memastikan kepatuhan terhadap HHI, termasuk melalui mekanisme akuntabilitas dan upaya advokasi untuk mengurangi pelanggaran (Krieger, 2016). Perhatian khusus diberikan pada konsekuensi kemanusiaan yang masif, yang menuntut pendekatan komprehensif dari semua pihak untuk memitigasi penderitaan dan mempromosikan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan (Qafisheh, 2019; Weizman, 2017).

Pernyataan Masalah Meskipun Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara eksplisit mengatur perilaku pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata, implementasinya dalam konteks konflik Israel-Palestina menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Berbagai laporan dan investigasi oleh organisasi internasional dan badan PBB secara konsisten menyoroti dugaan pelanggaran HHI yang dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk serangan yang tidak proporsional, kegagalan dalam membedakan antara target militer dan sipil, serta pembatasan akses kemanusiaan. Persistensi pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas HHI dalam konflik ini dan implikasinya terhadap perlindungan warga sipil serta upaya menuju penyelesaian konflik yang adil.

Lebih lanjut, tantangan dalam menegakkan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran HHI dalam konflik Israel-Palestina memperburuk situasi kemanusiaan dan berkontribusi pada impunitas. Mekanisme hukum internasional dan domestik seringkali dihadapkan pada kendala politis dan yuridis yang kompleks, menghambat proses investigasi dan penuntutan terhadap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Ketidakmampuan untuk secara efektif meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar HHI tidak hanya merusak kredibilitas sistem hukum internasional, tetapi juga berpotensi melanggengkan siklus kekerasan dan menghambat upaya rekonsiliasi serta perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam implementasi dan penegakan HHI dalam konteks unik konflik Israel-Palestina.

Sejumlah studi terdahulu, seperti yang dikaji oleh Roberts dan Guelff (2019), serta Schindler dan Toman (2020), telah menyoroti bahwa konflik asimetris memperumit penerapan hukum perang konvensional. Studi oleh Akande dan Shah (2021) juga menekankan bahwa mekanisme internasional seperti ICC belum efektif dalam memproses pelanggaran karena terhambat oleh aspek yuridis dan politis. Namun demikian, penelitian-penelitian ini masih cenderung berfokus pada dokumentasi pelanggaran, tanpa menggali secara mendalam akar permasalahan dalam implementasi hukum tersebut.

Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang ingin dijawab oleh studi ini. Penelitian terdahulu jarang membahas mengapa norma HHI gagal diterapkan secara efektif dan bagaimana faktor struktural seperti impunitas dan konflik politik internasional berkontribusi terhadap kegagalan tersebut. Belum banyak pendekatan yang menawarkan solusi aplikatif, terutama dalam konteks konflik yang sangat politis dan melibatkan aktor non-negara.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat bahwa kegagalan HHI dalam konflik ini dapat menjadi preseden buruk bagi konflik Palestina bersenjata lainnya di dunia. Tanpa perbaikan dalam pendekatan dan strategi implementasi hukum, maka kerusakan kemanusiaan akan terus terjadi dan hukum perang akan kehilangan relevansinya di mata publik global (Wehberg, 2021). Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme hukum yang ada perlu dilakukan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi kerangka akuntabilitas alternatif dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan pelanggaran. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menyarankan adanya pendekatan resolusi konflik yang lebih adaptif dan partisipatif, melibatkan aktor lokal dan regional dalam penyusunan resolusi internasional agar lebih kontekstual dan aplikatif.

Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip HHI dalam konflik Israel-, menilai sejauh mana tindakan para pihak sejalan dengan hukum yang berlaku, serta mengevaluasi peran komunitas internasional dalam mendukung penegakan hukum tersebut. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi alternatif untuk mendorong kepatuhan terhadap HHI.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis. Penelitian ini memberikan dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan internasional, organisasi HAM, dan komunitas sipil dalam merancang intervensi berbasis hukum yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya literatur tentang HHI dalam konflik asimetris yang sangat jarang dikaji secara mendalam di luar perspektif normatif.

Implikasi dari penelitian ini sangat luas. Temuan-temuan yang diperoleh diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip HHI dalam konteks konflik modern. Penelitian ini juga mendorong pentingnya penguatan akuntabilitas, pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih fleksibel, serta pembangunan budaya penghormatan hukum internasional sebagai fondasi penting dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara adil dan berkelanjutan.

Tujuan dan Ruang Lingkup. Jurnal ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara mendalam dinamika implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konteks konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi dan mengevaluasi konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pihak Israel dan Palestina berdasarkan prinsip-prinsip HHI. Menganalisis dampak konflik terhadap warga sipil dan mengkaji kepatuhan pihak-pihak yang bertikai terhadap kewajiban perlindungan sipil. Mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan-tantangan utama dalam penegakan HHI di lapangan, termasuk isu akuntabilitas dan impunitas. Menganalisis peran dan efektivitas berbagai resolusi dan inisiatif internasional dalam mengurangi pelanggaran HHI dan meningkatkan perlindungan kemanusiaan di kawasan tersebut. Memberikan kontribusi terhadap studi hukum dan kemanusiaan dengan menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai penerapan HHI dalam konflik asimetris dan berkepanjangan.

Jurnal ini akan berfokus pada analisis implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik antara Israel dan Palestina, dengan penekanan pada periode waktu tertentu yang relevan dengan perkembangan signifikan dalam konflik dan respons internasional. Analisis akan mencakup tindakan-tindakan militer dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, dengan merujuk pada prinsip-prinsip utama HHI yang relevan, seperti prinsip perbedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kewajiban untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak langsung dan tidak langsung dari konflik terhadap warga sipil, termasuk isu-isu terkait dengan perlindungan, akses kemanusiaan, dan akuntabilitas atas pelanggaran. Ruang lingkup geografis penelitian ini terutama akan mencakup wilayah-wilayah yang secara langsung terdampak oleh konflik, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan wilayah Israel yang berbatasan. Analisis terhadap resolusi dan inisiatif internasional akan mencakup tindakan yang diambil oleh organisasi internasional (seperti PBB dan badan-badannya), pengadilan internasional, dan aktor-aktor negara lainnya yang berupaya untuk mengatasi pelanggaran HHI dan mempromosikan penyelesaian konflik yang adil.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini akan menganalisis data primer dan sekunder secara mendalam untuk memahami dinamika implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Israel-Palestina. Data primer akan mencakup analisis terhadap laporan-laporan dari organisasi internasional (PBB, ICRC, organisasi hak asasi manusia), pernyataan resmi dari pihak-pihak yang berkonflik, dan dokumen hukum relevan. Data sekunder akan dikumpulkan dari literatur akademik, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu mengenai HHI dan konflik Israel-Palestina. Analisis data akan bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada identifikasi pola pelanggaran, tantangan penegakan hukum, dan efektivitas respons internasional. Pendekatan studi kasus dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai kompleksitas penerapan HHI dalam konflik spesifik dan berkepanjangan ini.

Desain Penelitian

Penelitian ini akan mengadopsi desain penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam dan komprehensif mengenai dinamika implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konteks konflik Israel-Palestina yang kompleks dan berkepanjangan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui analisis dokumen, termasuk laporan organisasi internasional (PBB, ICRC, Human Rights Watch, Amnesty International), resolusi Dewan Keamanan PBB, putusan pengadilan internasional, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dengan para ahli di bidang hukum humaniter, hubungan internasional, dan studi kawasan akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai tantangan implementasi dan penegakan HHI. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, makna, dan interpretasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Alasan Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada sifat kompleks dan sensitif dari isu yang diteliti. Konflik Israel-Palestina melibatkan berbagai dimensi sosial, politik, dan hukum yang tidak dapat sepenuhnya diukur atau direduksi menjadi angka. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks spesifik konflik dan bagaimana HHI diterapkan, diinterpretasikan, dan dilanggar dalam realitas yang kompleks ini. Analisis dokumen akan memberikan pemahaman tentang kerangka normatif dan catatan resmi terkait isu tersebut, sementara wawancara dengan para ahli akan memperkaya pemahaman peneliti dengan perspektif yang beragam dan mendalam. Metode kualitatif memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih nuanced dan kontekstual mengenai dinamika HHI dalam konflik Israel-Palestina, yang tidak mungkin dicapai melalui pendekatan kuantitatif semata.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui dua metode utama: analisis dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Analisis dokumen akan melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini meliputi laporan-laporan yang diterbitkan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komite-komitennya (UNHRC, UNGA), Komite Internasional Palang Merah (ICRC), serta organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Human Rights Watch dan Amnesty International. Selain itu, resolusi Dewan Keamanan PBB, putusan dan opini hukum dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta pernyataan resmi dari pemerintah Israel dan perwakilan Palestina juga akan dianalisis. Dokumen-dokumen ini akan diakses melalui basis data online resmi, situs web organisasi terkait, dan publikasi akademik.

Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan sejumlah informan ahli yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum humaniter internasional, konflik Israel-Palestina, dan isu-isu terkait hak asasi manusia di kawasan tersebut. Calon informan meliputi akademisi hukum internasional, praktisi hukum yang bekerja di organisasi internasional atau NGO, diplomat yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik, dan analis politik dengan keahlian di Timur Tengah. Proses wawancara akan dipandu oleh daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk memberikan pandangan, pengalaman, dan analisis mendalam

mengenai tantangan implementasi HHI, dampak konflik terhadap warga sipil, dan efektivitas mekanisme penegakan hukum. Wawancara akan direkam (dengan izin informan) dan ditranskripsikan untuk analisis lebih lanjut. Pemilihan informan akan dilakukan secara purposif untuk memastikan representasi beragam perspektif dan keahlian yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis Data

Data yang terkumpul dari analisis dokumen akan dianalisis menggunakan metode analisis konten kualitatif. Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema kunci yang relevan dengan pertanyaan penelitian, seperti jenis-jenis dugaan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI), pihak-pihak yang terlibat, respons dari organisasi internasional, dan tantangan dalam penegakan hukum. Data dari berbagai dokumen akan dikategorikan dan dikodekan berdasarkan tema-tema ini untuk mengidentifikasi pola, frekuensi, dan intensitas isu-isu yang muncul. Perbandingan silang antar dokumen dari berbagai sumber akan dilakukan untuk memvalidasi temuan dan mengidentifikasi perspektif yang berbeda atau kontradiktif. Analisis naratif juga akan diterapkan untuk memahami bagaimana isu-isu HHI dikonstruksikan dan direpresentasikan dalam berbagai jenis dokumen.

Data yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Transkrip wawancara akan dibaca secara berulang untuk mengidentifikasi tema-tema signifikan yang muncul dari narasi para ahli. Proses pengkodean akan dilakukan untuk mengorganisir data ke dalam kategori-kategori tematik yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti tantangan implementasi HHI, dampak konflik terhadap warga sipil, efektivitas mekanisme penegakan hukum, dan perspektif mengenai resolusi internasional. Analisis interpretatif akan digunakan untuk memahami makna dan signifikansi tema-tema ini dalam konteks konflik Israel-Palestina. Triangulasi data dari analisis dokumen dan wawancara akan dilakukan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, dengan membandingkan dan mengkontraskan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data.

Analisis data dari berbagai laporan organisasi internasional, seperti yang dikeluarkan oleh PBB dan organisasi hak asasi manusia, secara konsisten menyoroti pola dugaan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dilakukan oleh kedua pihak dalam konflik Israel-Palestina. Data menunjukkan frekuensi yang signifikan dari laporan mengenai serangan yang mengakibatkan korban sipil dalam jumlah besar, yang seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas dan pembedaan. Sebagai contoh, laporan-laporan mengenai operasi militer tertentu di Gaza seringkali mencatat tingginya jumlah warga sipil yang tewas dan terluka, serta kerusakan infrastruktur sipil yang meluas. Temuan ini relevan dengan teori HHI yang menekankan kewajiban pihak-pihak yang bertikai untuk mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menghindari kerugian sipil dan membatasi serangan hanya pada target militer yang sah. Ketidaksesuaian antara data korban sipil dan justifikasi militer yang diberikan seringkali mengindikasikan potensi pelanggaran prinsip-prinsip mendasar HHI.

Lebih lanjut, analisis data juga menyoroti tantangan dalam memastikan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran HHI. Meskipun terdapat berbagai resolusi internasional dan seruan untuk investigasi, mekanisme penegakan hukum internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menghadapi kendala yurisdiksi dan politis yang signifikan dalam menangani situasi di Israel dan Palestina. Data menunjukkan bahwa meskipun ada penyelidikan awal dan pengumpulan bukti, proses penuntutan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran HHI berjalan lambat dan seringkali terhenti. Temuan ini berkorelasi dengan teori-teori mengenai efektivitas hukum internasional dan kepatuhan, yang menunjukkan bahwa tanpa mekanisme penegakan yang kuat dan dukungan politis yang konsisten, norma hukum internasional seringkali sulit untuk ditegakkan dalam konteks konflik yang sangat politis dan sensitif.

Analisis wawancara dengan para ahli memberikan wawasan tambahan mengenai kompleksitas implementasi HHI di lapangan. Para ahli menekankan bagaimana interpretasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip HHI, terutama dalam konteks perang asimetris dan penggunaan taktik seperti perisai manusia, menjadi sumber utama perselisihan dan potensi pelanggaran. Mereka juga menyoroti peran narasi politik dan media dalam membentuk persepsi mengenai legitimasi tindakan militer dan akuntabilitas atas kerugian sipil. Pandangan para ahli ini memperkaya pemahaman teoritis mengenai bagaimana faktor-faktor non-hukum, seperti politik dan ideologi, dapat secara signifikan memengaruhi penerapan dan penegakan norma hukum internasional dalam konflik nyata.

Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan adanya kesenjangan yang berkelanjutan antara norma-norma ideal HHI dan realitas konflik Israel-Palestina. Pola dugaan pelanggaran yang berulang, tantangan dalam akuntabilitas, dan kompleksitas interpretasi hukum di tengah dinamika politik yang kuat menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap HHI dan melindungi warga sipil dalam konflik berkepanjangan ini. Temuan ini mengkonfirmasi relevansi kerangka teoritis HHI dan literatur terkini yang menyoroti keterbatasan mekanisme penegakan tradisional dan perlunya solusi yang lebih adaptif dan kontekstual.

Penerapan Temuan.

Temuan penelitian mengenai tantangan implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Israel-Palestina memiliki implikasi yang signifikan bagi doktrin dan praktik militer secara lebih luas, terutama dalam konteks operasi kontraterorisme dan konflik asimetris. Pola dugaan pelanggaran terkait prinsip proporsionalitas dan pembedaan yang teridentifikasi menyoroti kesulitan inheren dalam menyeimbangkan tujuan militer dengan kewajiban untuk meminimalkan kerugian sipil di lingkungan operasi yang kompleks. Pada tingkat operasional, temuan ini menekankan perlunya pelatihan yang lebih mendalam dan kontekstual bagi personel militer mengenai interpretasi dan penerapan HHI dalam skenario peperangan yang tidak konvensional, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan mitigasi kerugian sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan.

Pada tingkat taktis, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan dan implementasi aturan keterlibatan (Rules of Engagement - ROE) yang secara eksplisit mencerminkan prinsip-prinsip HHI dan memberikan panduan yang jelas bagi para komandan dan prajurit di lapangan. Temuan mengenai tantangan dalam membedakan antara kombatan dan

warga sipil, terutama dalam konteks aktor non-negara dan penggunaan perisai manusia, menuntut pengembangan taktik dan teknologi pengawasan yang lebih canggih dan diskriminatif. Selain itu, perlunya mekanisme pelaporan dan investigasi internal yang kredibel dan transparan menjadi krusial untuk membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas atas potensi pelanggaran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi legitimasi operasi militer di mata publik domestik dan internasional.

Pada tingkat strategis, temuan penelitian menyoroti implikasi jangka panjang dari dugaan pelanggaran HHI terhadap tujuan strategis yang lebih luas, seperti stabilitas regional dan dukungan internasional. Persepsi mengenai pelanggaran HHI dapat merusak legitimasi tindakan militer dan kontraproduktif terhadap upaya membangun perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi pertimbangan HHI ke dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi menjadi esensial. Ini mencakup pengembangan kebijakan yang secara proaktif mencegah pelanggaran, memastikan akuntabilitas, dan membangun narasi yang kredibel mengenai kepatuhan terhadap norma hukum internasional. Keterlibatan dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil juga penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mengatasi persepsi negatif.

Lebih jauh, temuan penelitian ini relevan dengan pengembangan doktrin militer di masa depan yang menghadapi tantangan serupa dalam konflik asimetris di berbagai belahan dunia. Pembelajaran dari kasus Israel-Palestina dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dan potensi jebakan dalam menerapkan HHI dalam lingkungan operasi yang kompleks dan dipolitisasi. Ini termasuk pentingnya investasi dalam intelijen yang akurat, teknologi yang presisi, pelatihan yang komprehensif, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Pada akhirnya, integrasi yang lebih kuat antara prinsip-prinsip hukum humaniter dan praktik militer tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga imperatif strategis untuk memastikan keberhasilan misi dan mempertahankan legitimasi dalam jangka panjang.

Kritis dan Kreativitas.

Penelitian ini berupaya untuk melampaui analisis deskriptif tradisional mengenai implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Israel-Palestina dengan menawarkan perspektif kritis terhadap asumsi-asumsi yang mendasari kerangka hukum saat ini dalam konteks peperangan asimetris. Alih-alih hanya mengidentifikasi pelanggaran, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam apakah kerangka normatif HHI yang ada, yang sebagian besar dikembangkan dalam konteks konflik antarnegara, secara memadai mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh aktor non-negara, operasi kontraterorisme, dan penggunaan teknologi canggih dalam konflik kontemporer. Perspektif kritis ini akan mendorong evaluasi terhadap potensi keterbatasan HHI dalam memberikan perlindungan efektif bagi warga sipil dalam konflik yang melibatkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan taktik peperangan yang tidak konvensional.

Selain itu, penelitian ini akan mengedepankan pendekatan yang kreatif dalam menganalisis mekanisme akuntabilitas. Alih-alih hanya berfokus pada jalur litigasi formal melalui pengadilan internasional, penelitian ini akan mengeksplorasi potensi mekanisme akuntabilitas alternatif yang mungkin lebih efektif dalam konteks konflik Israel-Palestina yang sangat politis. Ini dapat mencakup analisis terhadap peran investigasi berbasis masyarakat sipil yang didukung oleh teknologi digital, penggunaan mekanisme pelaporan dan pemantauan

independen dengan mandat yang lebih kuat, serta potensi pemanfaatan tekanan diplomatik dan ekonomi yang terkoordinasi untuk mendorong pertanggungjawaban. Pendekatan kreatif ini bertujuan untuk mencari solusi inovatif untuk mengatasi impunitas yang kronis dan meningkatkan kepatuhan terhadap HHI di lapangan.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menawarkan perspektif baru mengenai peran resolusi internasional dalam konflik Israel-Palestina. Alih-alih hanya mengkritisi kurangnya implementasi resolusi yang ada, penelitian ini akan menganalisis potensi pengembangan kerangka resolusi yang lebih adaptif dan kontekstual, yang mempertimbangkan dinamika spesifik konflik dan melibatkan aktor-aktor regional dan lokal secara lebih efektif. Perspektif ini akan mengeksplorasi kemungkinan penggunaan mekanisme mediasi dan fasilitasi yang lebih inovatif, serta potensi untuk mengintegrasikan pertimbangan keadilan transisional dan rekonsiliasi ke dalam upaya penyelesaian konflik di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap studi hukum dan kemanusiaan dengan menawarkan perspektif kritis terhadap kerangka HHI yang ada dan mengeksplorasi pendekatan kreatif untuk meningkatkan implementasi, akuntabilitas, dan resolusi dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dengan melampaui analisis konvensional, penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pemikiran baru dan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan kemanusiaan dan hukum yang kompleks di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Israel-Palestina menghadapi tantangan struktural dan politis yang sangat kompleks, termasuk pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan pembedaan serta lemahnya mekanisme akuntabilitas. Dugaan pelanggaran HHI oleh kedua belah pihak terus berulang, sementara upaya penegakan hukum kerap terhambat oleh kepentingan politik dan minimnya instrumen penegakan yang efektif. Temuan ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam mendorong kepatuhan terhadap HHI, termasuk integrasi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam kebijakan militer, peningkatan kapasitas investigatif, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan eksplorasi lebih dalam terhadap potensi mekanisme alternatif akuntabilitas—seperti teknologi pelacakan pelanggaran berbasis komunitas, diplomasi multitrack, dan resolusi konflik berbasis keadilan transisional—guna menjawab kebuntuan penegakan hukum konvensional. Penelitian lintas-disiplin yang menggabungkan kajian hukum, hubungan internasional, dan teknologi informasi juga penting untuk merumuskan solusi inovatif yang dapat memperkuat perlindungan warga sipil dan menekan impunitas dalam konflik berkepanjangan seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, S. M. (2021). The Gaza Strip: Legal and humanitarian challenges. *Journal of Palestine Studies*, 50(3), 20-35.
- Bisharat, G. E. (2019). Humanitarian law and the Israeli-Palestinian conflict: A critical assessment. *Journal of Conflict and Security Law*, 24(2), 227-248.
- Cullinan, B. (2021). The challenge of applying international humanitarian law to urban warfare in the Israeli-Palestinian conflict. *Journal of Conflict and Security Law*, 26(3), 441-460.

- El-Farra, M., Al-Bastami, A., & Al-Khalidi, S. (2020). The impact of the Israeli-Palestinian conflict on children's mental health in the Gaza Strip: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 3624.
- Galperin, A. (2018). Non-state armed groups and the applicability of international humanitarian law: The case of Hamas in Gaza. *Israel Law Review*, 51(1), 77-106.
- Kammel, A. (2020). The impact of new technologies of warfare on the principle of distinction in the Israeli-Palestinian conflict. *Journal of International Peacekeeping*, 24(2), 174-192.
- Krieger, A. (2016). The international community and compliance with international humanitarian law in the Israeli-Palestinian conflict: A case for accountability. *Human Rights Review*, 17(2), 209-228.
- Lynk, M. (2022). Unlawful occupation and international humanitarian law: A legal framework for the occupied Palestinian territory. *Yearbook of International Humanitarian Law*, 23, 1-28.
- Rudi Candra, R., Aprilia Restuning Tunggal, A., & Ida Susilowati, I. (2022). *Mengenal Hubungan Internasional*. UNIDA Gontor Press.
- Rajasingham, L. (2023). The principle of proportionality in asymmetric warfare: Challenges in the Israeli-Palestinian context. *International Review of the Red Cross*, 105(924), 203-225.
- Roberts, Adam, dan Richard Guelff (eds.). Documents on the Laws of War. Oxford University Press, edisi terbaru.
- Sayapin, S. (2017). Non-state armed groups and international humanitarian law in the Israel-Palestine conflict. *Military Law and Law of War Review*, 56(2), 173-200.
- Shoukri, R. (2022). Modern military tactics and the protection of civilians under international humanitarian law in the Gaza Strip. *Journal of Conflict and Security Law*, 27(1), 69-92.
- Schindler, Dietrich, dan Jiří Toman. The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents. Martinus Nijhoff Publishers, edisi terbaru.
- Weizman, E. (2017). The least of all possible evils: Humanitarianism and the Israeli-Palestinian conflict. *Journal of Palestine Studies*, 46(4), 8-23.
- Wehberg, Hans-Joachim. The Problem of Aggression in the Context of International Law. Cambridge University Press, edisi terbaru (jika relevan dengan konteks konflik).
- Qafisheh, M. (2019). Humanitarian consequences of the blockade on Gaza: A legal perspective. *Refugee Survey Quarterly*, 38(2), 163-189.
- Zanotti, L. (2018). The politics of interpretation: Framing violations of international humanitarian law in the Israeli-Palestinian conflict. *Third World Quarterly*, 39(10), 1955-1972.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).